

## Warga Margajaya Ngeluh ke DPRD Kota Bogor Soal Penyaluran BPNT

**BOGOR (IM)** - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menerima pengaduan dari masyarakat perihal proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bogor. Pengaduan tersebut datang dari warga Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharuskan membeli beras dan bahan pokok lainnya di depan kelurahan.

"Dalam aduan yang masuk kepada saya, warga meminta tolong untuk dikawal penyaluran BPNT. Di kelurahan Margajaya, yang dapat bantuan Rp600 ribu, harus beli beras dan lain-lain di depan kelurahannya. Sementara di kelurahan sebelah yaitu Balumbang Jaya, tidak ada yang seperti itu," ungkap Karnain, Kamis (10/3) pagi.

Karnain melanjutkan, warga yang mengadu juga menyatakan, bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menjelekkan pihak kelurahan Margajaya, tetapi itu yang terjadi di lapangan.

"Warga bukan menjelekkan kelurahan Margajaya, tapi itu yang terjadi di lapangan. Walaupun sifatnya tidak memaksa, tapi warga merasa kebetaran, yang pada akhirnya mau tidak mau membeli juga. Warga yang mengadukan itu juga meminta maaf, karena hanya menyampaikan keluhan saja," tambahya.

Karnain juga menuturkan, sebelumnya pihaknya juga

mendapatkan aduan dari masyarakat, terdapat paksaan kepada para penerima manfaat untuk membelanjakan uang bantuan tersebut di lokasi pembagian sebesar Rp200 ribu. Keadaan ini tentunya telah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang dijelaskan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor saat rapat kerja dengan komisi IV beberapa waktu lalu.

"Penjelasan Dinsos di Raker Komisi IV pekan lalu, Pemkot atau Pemkab hanya melaksanakan penugasan bahwa penyaluran BPNT disalurkan secara tunai melalui kantor pos, di kelurahan oleh petugas kantor pos," tuturnya.

Karnain memaparkan, selanjutnya kewajiban Pemkot Bogor mendukung KPM untuk membelanjakan dana tunai sesuai peruntukannya yaitu, belanja bahan pangan pokok.

"Belanjanya bisa di e-warung terdekat, pasar tradisional atau tempat belanja lainnya yang bisa diakses masyarakat. Tidak ada kewajiban untuk belanja di satu titik yang ditentukan," tambah Karnain.

Karnain menjelaskan, dengan adanya kejadian yang terjadi saat ini, ia meminta pihak kecamatan dan kelurahan yang memiliki KPM untuk mengawal proses penyalurannya. Sebab, apa yang terjadi saat ini jelas merupakan suatu kesalahan sistem penyaluran dan tidak boleh dibiarkan. ● **gio**

## TINGKATKAN PEMBELIAN BERAS CARITA MAKMUR

### Kadistanhorbun Kab. Bogor Harap Pegawai BUMD Ikut Membeli

**CIBINONG (IM)** - Di Tahun 2022 ini sebanyak 850 ton beras bermerk Carita Makmur yang berasal dari sentra-sentra pertanian padi diserap atau dibeli oleh ASN maupun pegawai Pemkab Bogor.

Jumlah kuota serapan beras Carita Makmur terus meningkat. Jika di Tahun 2019 jumlah beras Carita Makmur yang diserap sebanyak 85 ton, lalu di Tahun 2020 dan 2021 naik menjadi 815 dan 820 ton.

"Tahun ini, Pemkab Bogor melalui PD. Pasar Tohaga membeli 850 ton, yang kemudian dijual ke ASN maupun pegawai Pemkab Bogor, badan layanan usaha daerah (BLUD) atau 4 RSUD yang ada," kata Kepala Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Siti Nuriyanti kepada wartawan, Kamis, (10/3).

Siti Nuriyanti berharap, beras Carita Makmur kedepan juga dibeli oleh pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, seperti Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE), PT. Sayaga Wisata, BPRS Tegar Beriman dan lainnya.

"Kami berharap pegawai BUMD selain PD. Pasar Tohaga ikut mematuhi Perbup Bogor nomor 9 Tahun 2019

tentang imbauan pembelian beras Carita Makmur, langkah ini demi membantu kesejahteraan petani di Kabupaten Bogor dan mengurangi keberadaan tengkulak. Saat ini hasil produksi beras petani Kabupaten Bogor pertahun mencapai 3.200 ton," harap Nuriyanti sapaan akrabnya.

Alumni IPB University ini menuturkan bahwa kualitas dan mutu beras Carita Makmur sudah terjamin dan tersertifikasi. Setiap enam bulan, Distanhorbun dengan lembaga penguji rutin mengecek kelayakannya.

"Kami bersama lembaga penguji, rutin melakukan uji layak. Hingga kualitas dan mutu beras Carita Makmur terjamin, apalagi kami tidak melakukan pemutihan dan tidak memakai zat atau bahan pengawet," tuturnya.

Nuriyanti menjelaskan, bahwa jajaran Distanhorbun dibantu Kementerian Pertanian dan lembaga lainnya akan terus meningkatkan produksi beras, caranya dengan memperbanyak masa panen dalam setahun.

"Pasca panen padi yang kini dua kali dalam setahun, akan kami tingkatkan menjadi tiga hingga empat kali panen. Selain kualitas medium, petani juga memiliki produk premium beras Carita Makmur," jelas Nuriyanti. ● **gio**

## Anggarkan Rp3 Miliar, Pemda KBB Bakal Perbaiki Jalan Cihampelas

**BANDUNG (IM)** - Mimpi warga Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk memiliki jalan mulus bakal segera jadi kenyataan.

Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk perbaikan jalan di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Seperti diketahui, ruas Jalan Pembangunan, tepatnya di Kampung Cihampelas, RT 07/02, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) rusak parah dan hanya diperbaiki sekadarnya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPTR Bandung Barat, Aan Sopian mengatakan, pihaknya memiliki anggaran sebesar Rp 3 miliar yang merupakan dari pengeseran APBD yang akan digunakan untuk perbaikan jalan dari pertigaan Cihampelas hingga Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

"Jalan tersebut sebelumnya sempat viral lantaran ditebar ikan lele oleh warga," katanya saat ditemui di ruangannya, Kamis (10/3).

Kendati demikian, terang dia, lantaran kondisi APBD Pemda KBB saat ini sangat parah maka perbaikan jalan di

Desa Tanjungjaya tidak akan tuntas, kurang lebih hanya 800 meter.

"Anggarannya hanya cukup untuk 800 meter, tapi insya Allah bisa menuntaskan permasalahan yang sempat viral kemarin," terangnya.

Menurutnya, kendati anggarannya terbatas, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka bisa mengatasi permasalahan yang bersifat urgen.

"Alhamdulillah dengan dukungan dari Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan yang menyetujui adanya pengeseran anggaran, ya masalah ini bisa dituntaskan," tuturnya.

"Kemarin pak kadis memberikan statmen akan dimulai lelang pada triwulan dua atau tiga," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, terkait dengan perbaikan Jalan Cihampelas-Tanjungjaya pada prinsipnya pemerintah selalu reaktif terhadap aspirasi masyarakat.

"Dan setiap ada persoalan itu langsung kita rapatkan," katanya.

Oleh karenanya, lanjut dia, kepada masyarakat jangan khawatir kalau ada masalah. Namun demikian, dalam penyelesaian masalah itu harus ada proses yang harus dilalui, katanya. ● **pur**

# 8 | Nusantara



### RAPAT KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI KEPALA DAERAH

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (kiri) menyaksikan penandatanganan oleh perwakilan kepala daerah saat rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah se Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/3). Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Jawa Barat guna mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemerintahan Jawa Barat.

## Pembangunan Sky Bridge Bojong Gede Ditarget Mulai April

Keberadaan sky bridge tersebut diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Stasiun Bojong Gede. Karena Stasiun Bojong Gede menjadi salah satu stasiun komuter terpadat.

**BOGOR (IM)** - Pemkab Bogor bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana membangun jembatan layang (sky bridge) senilai Rp 16 miliar di sekitar Stasiun Bojong Gede. Direktur Prasarana BPTJ, Jumardi, sky

bridge mulai dibangun pada April nanti.

"Saat ini proses pelelangan pekerjaan tersebut sedang berlangsung di mana pada akhir bulan ini diharapkan sudah dapat dilakukan penetapan pemenang lelang. Jadi kita ha-

rapkan groundbreaking dapat dilakukan pada bulan April," kata Jumardi melalui keterangan tertulis, Kamis (10/3).

Sky bridge tersebut dibiayai sepenuhnya oleh BPTJ senilai Rp 16,5 miliar. Sementara Pemkab Bogor bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan dengan anggaran Rp 4 miliar.

"Jembatan layang tersebut sepenuhnya dibiayai oleh APBN senilai Rp 16,5 miliar melalui anggaran BPTJ tahun 2022. Sementara Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk kebutuhan

pembebasan lahan," tuturnya.

Keberadaan sky bridge tersebut diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Stasiun Bojong Gede. Karena Stasiun Bojong Gede menjadi salah satu stasiun komuter terpadat.

"Stasiun Bojong Gede merupakan salah satu stasiun kereta di Jabodetabek dengan jumlah penumpang komuter terpadat. Sehari-hari sebelum pandemi bisa dipadati penumpang KRL hingga 65 ribu orang atau 1,86 juta orang/bulan, terpadat ketiga setelah Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi," terangnya.

Sky bridge sepanjang 243 meter dengan lebar 3 meter tersebut menghubungkan Stasiun Bojong Gede dengan Terminal Bojong Gede. Tiap ujungnya akan dilengkapi dengan area semacam hall.

Dari sisi stasiun, hall akan dilengkapi dengan fasilitas eskalator, ramp untuk penyandang disabilitas, toilet, musala, tapping gate, dan ruangan loket. Sementara hall pada sisi terminal akan dilengkapi dengan ramp untuk penyandang disabilitas, toilet, dan musala.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan sky bridge tersebut rencananya dibuat seperti jembatan penyeberangan orang (JPO). Sky bridge itu akan menghubungkan Stasiun Bojong Gede dengan Terminal Bojong Gede.

"Insya Allah tahun 2022 ini akan dibangun sky bridge untuk mengurangi kemacetan di Bojong Gede. Jadi orang naik ke atas nanti ada lorong begitu, naik-turunnya di atur. Dari Terminal Bojong Gede ke Stasiun Bojong Gede," ujar Ade, Kamis (6/1) lalu. ● **gio**

## Bupati dan Wabup Bogor, Gelar Musrembang Secara Virtual

**BOGOR (IM)** - Bupati Bogor Ade Yasin didampingi Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan melakukan kegiatan pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 bersama Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Bogor secara virtual, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Rabu (9/3).

Menurut Bupati Bogor, Ade Yasin, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menangani kemiskinan dan pengangguran harus disikapi bersama, karenanya penanganan kemiskinan itu harus dilakukan keroyokan oleh beberapa dinas, tidak hanya tugasnya Dinas Sosial tetapi ada beberapa dinas yang juga harus berusaha bagaimana tingkat kemiskinan ini bisa turun.

"Semuanya saya kira punya kepentingan, semua dinas punya kepentingan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Ini sangat penting jangan dianggap sepele. Jika ada program kegiatan yang tidak

ada kaitannya dengan itu, kita ganti, karena pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran tolak ukur dari keberhasilan kita," tegas Ade Yasin.

Ade Yasin juga menyampaikan, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 harus mengacu pada RPJMD karena RPJMD adalah kebijakan atau visi misi Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor yang harus diimplementasikan, dijalankan dan dikerjakan oleh para Kepala Perangkat Daerah, yaitu: pertama, menyelesaikan target Program Pancakarsa. Kedua, menangani pandemi Covid-19 dan permasalahan kesehatan lainnya. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menangani kemiskinan dan pengangguran. Keempat, menata penyederhanaan birokrasi. Kelima, mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

"Apakah semuanya sudah mengacu kepada RPJMD, melalui kegiatan hari ini kita akan evaluasi dan bahas bersama. Berapa persen usulan-usulan masyarakat dari bawah ke atas

itu ditampung atau diterima untuk dijadikan program oleh perangkat daerah, dan berapa persen usulan masyarakat dari tingkat desa itu dilaksanakan oleh kita," ujar Bupati Bogor.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa pra Musrenbang atau rapat konsultasi dan koordinasi terkait rencana penyusunan RKPD akan dilanjutkan dengan kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Bogor yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Bappedalibang sebagai salah satu tahapan menuju proses penyusunan APBD.

Hari ini saya ingin mengetahui, meyakinkan dan memastikan bahwa penyusunan RAPBD tahun 2023 ini tuntas, seperti apa yang Bupati dan Wakil Bupati janjikan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Bappedalibang, Kepala Bappenda dan Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, dan hadir secara virtual Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kabupaten Bogor. ● **gio**



### POLEMIK DI KAMPUS SBM ITB

Suasana kawasan gedung Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB yang sepi di Kawasan Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/3). Aktivitas dan proses belajar mengajar di Kampus SBM ITB untuk sementara tidak beroperasi akibat terjadinya polemik antara forum dosen SBM ITB dengan kebijakan Rektor ITB terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB.

## BPN Kota Bogor Mudahkan Layanan Pertanahan Terlengkap se-Indonesia

**JAKARTA (IM)** - Kota Bogor, Jawa Barat mendeklarasikan sebagai kota/kabupaten terlengkap pertama dalam hal pelayanan pertanahan. Dalam artian, semua bidang tanah di Kota Bogor, semua persil-persil yang ada di Kota Bogor sudah dipetakan dan sudah didaftarkan oleh Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Ini artinya, semua Kota Bogor sudah dilakukan deklarasi dan mencapai apa yang ditargetkan Kementerian ATR/BPN di 2024 untuk jadi Kota Lengkap. Dengan ini Kota Bogor akan menjadi satu-satunya kota terlengkap pemetaannya di Indonesia," kata Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bogor, Rahmat, Kamis (10/3).

Dengan capaian itu jelas dia, ada sejumlah kelebihan, tepatnya keuntungan baik bagi masyarakat umum, dunia usaha dan lain-lain. Selain memberi banyak kemudahan dalam layanan publik, dunia perpajakan dan mendorong peningkatan investasi dengan adanya kepastian.

Sesuai dengan apa yang dicanangkan, ungkap dia, ditargetkan pemerintah pusat yakin akan memudahkan tingkat investasi di Indonesia.

Di mana salah satu faktor, indikator supaya tingkat investasi itu menjadi mudah, baik dan pasti itu adalah membangun sistem tata ruang dan perantaraan yang ada di Indonesia. "Nah ini target pemerintah sekarang, menaikkan tingkat berusaha. Salah satunya itu di BPN, tugas di Kementerian ATR/BPN. Kami dari ATR/BPN itu membuat bagaimana data yang ada itu menjadi lebih memudahkan orang investasi, memudahkan orang dalam rangka berbisnis. Kami melakukan transformasi digital, sehingga indeks berinvestasi itu lebih rendah daripada yang sekarang, kalau engga salah 6 persen," jelasnya.

Sekadar diketahui, selama ini tingkat investasi di Indonesia berada di bawah Kamboja,

Thailand dan Malaysia. "Kota Bogor pada hari ini sudah menciptakan itu. Masyarakat bisa memanfaatkan itu. Sehingga dunia bisnis dan investasi ke depan bisa menggunakan data ini. Pemda, pusat bisa menggunakan yang kami ciptakan ini. Bahwa kami di ATR/BPN ini memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan nasional itu supaya investasi itu jelas," tambahya.

Pihaknya membuat road map tersebut sejak 2017. Pemerintah pun dalam hal ini Kementerian ATR/BPN menargetnya di 2024 semua bidang tanah di Indonesia terdaftar.

Termasuk di Kota Bogor. Namun dari road map yang sudah ada, di 2022 di dia mengklaim ATR/BPN Kota Bogor atau Kota Bogor sudah menjadi kota pertama di Indonesia sebagai kota terlengkap, kota lengkap atau menembus target itu lebih awal.

Lebih rincinya dia menjelaskan, dari 300.000-an total persil yang ada di Kota Bogor, sebanyak 272.000 lebih persil sudah terdaftar. Ada selisih 85 persen dari bidang tanah yang sudah ada terhadap bidang tanah yang sisanya 15 persen.

Sebanyak 15 persen tersebut tidak hanya bidang tanah, tetapi juga misalnya jalan, sungai dan fasilitas umum.

"Tapi secara keseluruhan kita sudah 99,17 persen persil yang untuk ditingkatkan menjadi sertifikasi. Selisih 15 persen itu yang non bidang tanah yang sifatnya fasilitas umum tadi. Seperti jalan, sungai, lapangan dan makam."

Keuntungan lain dengan adanya transformasi digital dengan 'Kota Lengkap', karena rapinya data, sudah terpetakan secara tata ruangnya, bisa mengetahui peruntukannya juga bisa mengetahui nilainya.

BPN Kota Bogor, pada 2021 lalu sudah melakukan survei berdasarkan 14 indikator. Dan dari hasil survei itu sudah dipetakan semua nilai bidang tanah yang itu. ● **gio**